



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDIE ANDI PRASETYA
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 162990

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.419.877.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/120 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
3. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
4. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 815.289.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 78.588.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 621.700.000**

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 171.700.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000



5. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	33.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.864.235.643
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.938.812.643
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.938.812.643

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.